

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pemuda adalah generasi muda yang berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat; Secara umum, pemuda dicirikan sebagai individu yang energik, *online*, kreatif, dan bersemangat tinggi yang berkontribusi signifikan terhadap kemajuan peradaban. Akibatnya, anak-anak dapat digambarkan sebagai aktor yang memainkan peran penting dalam mengendalikan dan menjalankan kehidupan komunitas mereka. Dia akan mengembangkan bagaimana memperbaiki masyarakat dan bahkan dapat mengatasi kesulitan untuk masalah sosial masyarakat dengan menggunakan pemikiran dan konsep inovatifnya. Tugas pokok dan fungsi pemuda telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Undang-undang ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa yang di dalamnya terdapat pemuda sebagai pelakunya. Membahas terkait pemuda tentunya banyak dimensi salah satunya yakni spirit belajar dan berani berkembang untuk mencoba hal baru. Oleh karena itu dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas terkait *social entrepreneurship* yang saat ini mulai banyak digandrungi oleh para pemuda. Melihat kondisi saat ini, minat dari para pemuda untuk terjun dalam bidang *social entrepreneurship* sudah mulai terbangun dan banyak diminati warga negara muda, dalam UU Nomor 40 tahun 2009 Tentang kepemudaan yang diatur secara teknis pada Pasal 3 tertera bahwa salah satu poin yang ada di dalamnya menjelaskan bahwa pemuda memiliki sifat yang inovatif, kreatif dan mandiri. Oleh karena itu jika kita korelasikan dengan konsep *social entrepreneurship* yang mengharuskan setiap pelakunya memiliki sifat yang kreatif, inovatif, dan mandiri maka kita akan melihat bahwa dengan memulai terjun dalam bidang entrepreneurship juga merupakan perilaku menjalankan amanat Undang-Undang Mindset berpikir segelintir warga negara muda yang masih terkesan tertinggal dari negara-negara maju tentunya mempengaruhi hal ini. Selain itu peran minim pemerintah dalam mendukung penumbuhan nilai-nilai *social entrepreneurship*

menjadi faktor penghambat yang menyebabkan stagnansi dalam pola berpikir serta bergerak warga negara muda. Tidak adanya kurikulum khusus yang menggali potensi-potensi *social entrepreneurship* dalam sistem pendidikan menjadi masalah yang harus kita pecahkan bersama. Maka dari itu upaya-upaya penumbuhan nilai-nilai *social entrepreneurship* harus segera dimulai dan dilatih di berbagai tempat pendidikan baik formal maupun informal tak terkecuali organisasi ekstra kampus.

Pada saat ini Indonesia memerlukan generasi muda yang mulai terjun ke dunia wirausaha, hal ini diperlukan agar kita selaku warga negara tidak hanya menjadi penikmat produk-produk luar yang mengakibatkan bangsa kita hanya menjadi bangsa konsumtif serta menjadi incaran pasar produk asing. Hal ini diperkuat dengan prediksi pemerintah serta beberapa tokoh yang menyebutkan bahwa pada tahun 2025-2030 Indonesia akan mengalami peristiwa bonus demografi yang dapat dijadikan potensi besar bagi bangsa kita untuk mendapat keuntungan dalam sisi pembangunan ekonomi bangsa.

Maryati (2015, hal.132) menjelaskan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan bonus demografi yakni kondisi disaat komposisi jumlah penduduk yang ada pada fase usia produktif (15-64 tahun) ada pada titik titik maksimal, dibandingkan dengan usia non- produktif (0-14 tahun dan diatas 65 tahun). Melihat kondisi ini, Ketersediaan lapangan pekerjaan tentunya menjadi hal utama yang perlu ditingkatkan karena peristiwa bonus demografi ini harus mampu dijadikan momentum memanfaatkan keuntungan jumlah usia produktif di Indonesia.

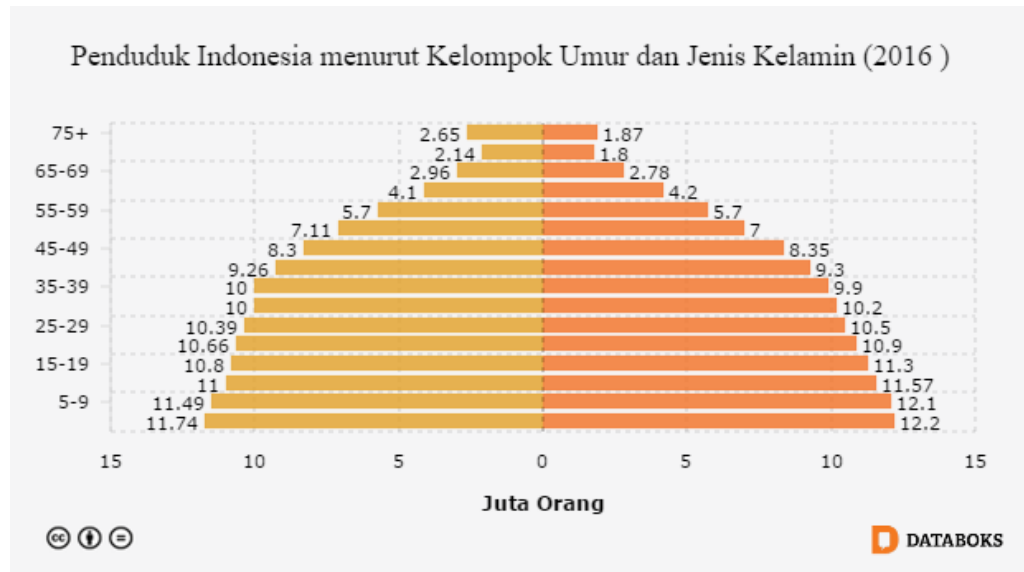
Bonus demografi bagi Indonesia dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang saling berkontradiksi. Di satu sisi jika kondisi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan pemerintah maka kesejahteraan dapat meningkat secara signifikan. Namun sebaliknya, jika masyarakat dan pemerintah tidak menyiapkan diri maka kualitas kesejahteraan justru yang semakin menurun. Jika kondisi kedua yang terjadi maka kita perlu untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi buruk bangsa yang dipenuhi dengan kemiskinan. Perlu diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2019 mencapai sebesar 25, 14 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2019). Dengan jumlah kemiskinan seperti itu tentunya akan menjadi ancaman besar bagi

Indonesia jika bonus demografi yang hadir justru menunjukkan sisi buruknya akibat ketidak siapan masyarakat dan pemerintah.

*Tren* rasio ketergantungan penduduk Indonesia periode 1971–2016 yang pada pelaksanaannya terus menerus mengalami penurunan menjadi salah satu penguat argumentasi tersebut. Terhitung tahun 2016, proyeksi Badan Pusat Statistik (Maryati, 2015, hal. 131) mengungkapkan rasio tersebut hanya akan sebesar 48,4%. Hal ini merupakan komparasi antara kelompok usia produktif non produktif kepada kelompok usia produktif Berdasarkan data yang didapat dalam beberapa tahun terakhir rasio ketergantungan penduduk Indonesia terus mengalami penurunan, dengan kata lain beban kelompok usia non-produktif menurun menjadi 48,41% terhadap kelompok usia produktif. Jika menghitung dengan data kalkulasi usia penduduk Indonesia maka akan mendapat kesimpulan bahwa setiap satu masyarakat kelompok usia produktif menanggung 48-49 penduduk kelompok usia non-produktif. Kondisi ini secara tidak langsung merupakan kondisi yang positif bagi kesejahteraan bangsa karena jika dihitung dengan rasio yang terus mengalami penurunan ini menunjukkan bahwa beban ekonomi kelompok masyarakat usia produktif semakin kecil untuk menanggung kelompok masyarakat usia non-produktif., maka dengan itu akan pula didapatkan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), piramida kelompok usia penduduk Indonesia 2017 tergolong ekspansif atau cembung di bagian tengah, selain itu Badan Pusat Statistik (BPS) menyimpulkan, bahwa Indonesia telah memasuki era bonus demografi. Era bonus demografi menurut BPS (Umar, 2018, hal. 90) akan mencapai puncaknya pada rentang tahun 2025-2030. Seperti pada grafik di bawah ini:

*Gambar 1.1*  
Grafik Penduduk Indonesia Menurut Umur dan Jenis Kelamin tahun 2016



(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018)

Menilik grafik di atas menurut Badan Pusat Statistik (Umar, 2018, hal. 91), kondisi ini menunjukkan bahwa era bonus demografi sedang berjalan di Indonesia yang mana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. Jadi, jika mengacu kepada teori terkait kependudukan, bonus demografi adalah suatu fenomena atau peristiwa yang mana kondisi penduduk sangat menguntungkan dan dapat dimaksimalkan dalam bidang pembangunan, hal ini dikarenakan jumlah penduduk dalam kelompok usia Produktif (15-64 tahun) sangat banyak sedangkan kelompok penduduk usia non-produktif semakin kecil atau sedikit.

Menurut hasil Sensus Ekonomi 2016, Indonesia mengalami peningkatan kesempatan kerja, yang bertepatan dengan penurunan rasio ketergantungan penduduk Indonesia. Perusahaan non-pertanian menyumbang 26,71 juta organisasi atau bisnis dalam Sensus Ekonomi. Jika dibandingkan dengan 22,37 juta perusahaan yang terdaftar dalam Sensus Ekonomi 2006, jumlah perusahaan tumbuh sebesar 17,51 persen. Menurut Sensus Ekonomi 2016, terdapat 22,37 juta perusahaan kecil dan menengah. Dalam Sensus Ekonomi 2016, jumlah total perusahaan di Jawa adalah 16,35 juta, atau 60,74 persen dari semua perusahaan. Ketika terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang besar, manfaat bonus demografi akan memberikan sisi positif bagi perekonomian nasional. Namun,

Sidik Panji Pangestu, 2021

**PERAN ORGANISASI EKSTRAKAMPUS DALAM MENUMBUHKAN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP WARGA NEGARA MUDA (STUDI KASUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOORDINATOR KOMISARIAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menurut data survei BPS, besarnya jumlah pengangguran pada tahun 2006 masih berpengaruh hingga saat ini. Selain itu, mengoptimalkan bonus demografi bukanlah tugas yang mudah karena diperlukan sinergi yang baik dari semua elemen pendukung.

Hal yang lebih mengkhawatirkan dari kondisi pengangguran di Indonesia ialah banyaknya para warga negara muda yang statusnya tidak bekerja. Hal ini menjadi suatu problematika yang terjadi di warga negara muda. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk muda mencapai 18,03 persen pada Februari 2021, menurut hasil Survei Tenaga Kerja Nasional (BPS, 2021). Pekerja antara usia 15 dan 24 disebut sebagai "muda." Menurut TPT, 18 dari setiap 100 orang muda di angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan. Secara keseluruhan angkatan kerja berusia 15-24 tahun telah mencapai 21,20 juta, menurut statistik Sakernas. Ini berarti 3,82 juta orang dalam kelompok usia tersebut yang menganggur. Jumlah tersebut lebih dari separuh dari total TPT nasional yang pada Februari 2021 sebesar 8,75 juta atau 6,26 persen. Secara persentase, TPT generasi muda mencapai 43,7 persen dari total TPT nasional.

Menurut Freire (2004, hal. 35) mengemukakan bahwa tingginya angka pengangguran di negara-negara berkembang memiliki banyak aspek yang saling berkaitan bagai mata rantai yang terkait satu sama lain. Ada banyak aspek yang mempengaruhinya yang diantaranya aspek pendidikan, sosial, budaya, dan politik. Variabel-variabel tersebut merupakan aspek yang sangat mempengaruhi tingkat perekonomian di tiap negara. Belum lagi berkaca kepada negara-negara maju yang mana prasyarat menjadi negara maju tidaknya sebuah negara sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya penduduk yang berwirausaha. Semakin banyaknya warga negara yang memiliki jiwa berwirausaha mempunyai kemampuan analisi melihat peluang-peluang bisnis, wirausaha mampu menjadi mesin untuk mengolah sumber daya yang ada menjadi sesuatu yang berdampak positif juga memiliki nilai ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

Melihat data, pengusaha muda di Indonesia masih berada dalam angka yang sedikit dibanding negara-negara maju. Angka pengusaha muda di Indonesia hingga tahun 2017 hanya sekitar 1,5 juta jiwa. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah warga negara muda atau pemuda Indonesia yang ada di angka sekitar 60 juta jiwa.

Sidik Panji Pangestu, 2021

*PERAN ORGANISASI EKSTRAKAMPUS DALAM MENUMBUHKAN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP WARGA NEGARA MUDA (STUDI KASUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOORDINATOR KOMISARIAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

Jika melihat sisi ideal, dengan angka jumlah penduduk muda di Indonesia untuk menjadi negara yang maju Indonesia minimal harus memiliki 20 juta jiwa masyarakat yang memiliki pengusaha muda yang usaha sendiri. Oleh karena itu untuk mengejar kekurangan 18,5 juta pengusaha muda, salah satu cara untuk menggenjot angka ketertinggalan itu yakni dengan adanya program pemberian bantuan-bantuan dana bagi para pelaku usaha serta pelatihan-pelatihan yang memberikan ilmu serta motivasi untuk menjadi pengusaha muda.

Imam (2011, hal. 1) menjelaskan bahwa dengan banyaknya jumlah pemuda yang menjadi pengusaha akan menjadikan kondisi dan situasi pasar yang lebih kompetitif. Selain itu, harapannya masyarakat mampu meningkatkan keterampilannya dalam berwirausaha baik pada ranah ekonomi mikro ataupun makro. Adapun hal yang paling penting dan tidak bisa dianggap ringan yakni sinergitas antara pemuda dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini harus juga melakukan upaya-upaya pendukung yang mana dapat dituangkan secara teknis dalam-kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mencetak *entrepreneur* muda. Oleh karenanya *social entrepreneurship* bisa dijadikan satu formulasi baik untuk menyambut bonus demografi yang sejalan dengan visi Indonesia emas 2045 yang ditargetkan pemerintah.

Secara teori *Social Entrepreneurship* adalah sosok wirausahawan yang *social driven*, pergerakannya tidak dilatarbelakangi hal-hal yang bersifat profit semata, adapun latar belakang lainnya yakni menjalankan misi sosial untuk mengatasi problematika sosial di masyarakat. *Social entrepreneurship* merupakan orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan berupaya menjadi *problem solver*? untuk perubahan positif atas persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, baik permasalahan sosial, pendidikan, kesehatan, atau masalah kemasyarakatan lain. Widiastuti dan Margaretha (2011, hal. 1) menjelaskan fokus utama dalam kajian *social entrepreneurship* yakni membuat formulasi ekonomi secara *entrepreneurially*, atau dengan kata lain wirausaha yang ulet dan berani mengambil risiko. Partisipasi warga negara muda dalam pembentukan pola pikir *social entrepreneurship* yang telah dijelaskan di atas sangatlah penting, hal ini dikarenakan pemuda yang berada dalam kelompok usia produktif merupakan orang yang memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung aktivitas pembangunan

bangsa di berbagai bidang dan hal yang paling utama yakni mendukung wacana pemerintah untuk menjadikan Indonesia emas 2045.

Melatih keterampilan *social entrepreneurship* bagi pemuda tentunya memerlukan wadah pembelajaran yang tepat. Organisasi kepemudaan merupakan wadah yang tepat untuk melatih pemuda menjadi individu yang berkualitas dan tentunya dapat melatih keterampilan *social entrepreneurship*. Dalam organisasi kepemudaan para pemuda akan dihadapkan pada berbagai dinamika organisasi yang kompleks yang mengharuskan pada anggota terutama pengurus untuk dapat memainkan pola manajemen yang baik dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Berbagai sumber daya tersebut tidak hanya berupa sumber daya fisik saja, melainkan juga sumber daya sosial di sekitar organisasi tersebut. Tentunya, berbagai sumber daya tadi kemudian harus diarahkan pada keuntungan bagi organisasi agar jalannya roda organisasi dapat berjalan secara baik. Oleh karena itu, organisasi kepemudaan merupakan wadah terbaik untuk melatih keterampilan *social entrepreneurship* bagi para pemuda.

Dalam ruang lingkup yang luas, organisasi kepemudaan ada banyak macamnya, mulai dari yang berbasis kemasyarakatan, keagamaan, bahkan kemahasiswaan. Dalam ruang lingkup universitas, kemudian dikenal organisasi ekstra kampus yang merupakan organisasi kepemudaan dengan pengkaderan sebagai pondasi utamanya. Adapun salah satu organisasi ekstrakampus tersebut yang juga merupakan organisasi ekstrakampus yang sudah sangat tua di Indonesia adalah HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam. Organisasi ini berdiri sejak tanggal 5 Februari 1947 di Jogjakarta. HMI yang merupakan organisasi mahasiswa tertua di Indonesia dan telah banyak mencetak kader-kader terbaik yang berkontribusi banyak untuk kemajuan bangsa. Sistem perkaderan dan dinamika didalam organisasi HMI terbukti telah berhasil mencetak kader-kader yang berkontribusi bagi kemajuan umat dan bangsa. Himpunan mahasiswa islam sebagai organisasi mahasiswa merupakan wadah pembelajaran dan pengembangan *softskill* mahasiswa untuk memberi banyak manfaat di kehidupan bermasyarakat. Selain itu membahas HMI tentunya akan erat kaitannya dengan perjalanan perkembangan bangsa, hal itu sejalan dengan latar belakang utama didirikannya HMI pada tahun 1947 yang mana untuk menjawab tantangan zaman pada masa itu. Oleh karena itu,

Sidik Panji Pangestu, 2021

**PERAN ORGANISASI EKSTRAKAMPUS DALAM MENUMBUHKAN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP WARGA NEGARA MUDA (STUDI KASUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOORDINATOR KOMISARIAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)



sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab bagi kader-kader HMI untuk mengulang kembali sejarah sebagai organisasi yang memberikan solusi dan formulasi bagi perjalanan bangsa Indonesia. Mengutip kata-kata dari pendiri HMI, Lafran Pane pernah berkata bahwa dimanapun kader HMI berkiprah maka harus selalu membawa kepentingan umat dan bangsa. Sudah seyogyanya kata-kata tersebut menjadi motivasi bagi setiap kader HMI untuk menjadi solusi di masyarakat.

Dalam konteks pengembangan *social entrepreneurship* HMI sebagai organisasi kepemudaan banyak memberikan jalan bagi para kadernya untuk mengembangkan *soft skill* tersebut. Beberapa diantaranya adalah adanya bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi (KPP) yang bertugas sebagai inisiator pengembangan jiwa *entrepreneurship* bagi para kader melalui berbagai program dan pelatihan. Tentunya, segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh HMI bukan semata-mata untuk menghasilkan profit bagi pribadi organisasi pribadi, melainkan melaksanakan tanggung jawab Tri Darma perguruan tinggi yang salah satu poinnya yakni pengabdian pada masyarakat. Dengan demikian, secara tidak langsung HMI telah memberikan kontribusi bagi para kadernya dalam melatih keterampilan *social entrepreneurship*.

Guna mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi Indonesia pada tahun 2045 perlu adanya persiapan yang matang agar bangsa Indonesia dapat menuai manfaat atas kesempatan tersebut. Namun, realita yang saat ini terjadi justru memperlihatkan ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi bonus demografi yang salah satunya dapat terlihat dari tingginya jumlah pemuda menganggur serta rendahnya jumlah pengusaha muda. Jika keadaan seperti ini terus berjalan, maka bukan manfaat yang akan kita dapatkan dari bonus demografi justru bencana besar berupa naiknya angka kemiskinan.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai organisasi pengkaderan memiliki potensi besar untuk melahirkan para wirausaha muda yang memiliki jiwa sosial. Hal itu sesuai dengan tujuannya yang mendambakan terbinanya insan pencipta dan pengabdian yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil makmur. Khususnya pada HMI Korkom UPI yang dalam strukturnya memiliki satu bidang khusus berkaitan dengan peningkatan keterampilan wirausaha para kader, maka sudah selayaknya



HMI Korkom UPI dapat menjadi inisiator pembinaan keterampilan *social entrepreneurship* warga negara muda.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dengan menimbang betapa pentingnya penanaman keterampilan *social entrepreneurship* bagi para pemuda, maka perlu adanya suatu kajian yang dapat menjelaskan secara lebih komprehensif bagaimana peran HMI sebagai organisasi ekstra kampus dalam melatih keterampilan *social entrepreneurship* bagi para kadernya. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “Peran Organisasi Ekstrakampus dalam Menumbuhkan *Social Entrepreneurship* Warga Negara Muda (Studi Kasus Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat UPI)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian secara umum yaitu, Bagaimana penanaman skil *social entrepreneurship* kepada warga negara melalui organisasi HMI KORKOM UPI. Kemudian agar penelitian ini lebih operasional dan masalah umum tersebut bisa dikaji secara terfokus, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sesuai dengan inti permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan model upaya pembentukan *social entrepreneurship* warga negara muda melalui organisasi ekstra kampus HMI Korkom UPI?
2. Apa saja *social skill* yang dibentuk melalui kegiatan-kegiatan organisasi ekstra kampus HMI Korkom UPI?
3. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembentukan *social entrepreneurship* warga negara muda melalui organisasi ekstra kampus HMI Korkom UPI?
4. Bagaimana upaya untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pembentukan *social entrepreneurship* warga negara muda melalui organisasi ekstra kampus HMI Korkom UPI?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan umum yang diharapkan terwujud setelah kegiatan penelitian ini adalah memberikan jawaban dan solusi terkait penanaman skil *social entrepreneurship* yang hingga saat ini belum menuai hasil yang maksimal. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bentuk dan model upaya pembentukan *social entrepreneurship* warga negara muda melalui organisasi ekstra kampus HMI Korkom UPI.
2. Mengetahui apa saja *social skill* yang dibentuk melalui kegiatan-kegiatan organisasi ekstra kampus HMI Korkom UPI.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembentukan *social entrepreneurship* warga negara muda melalui organisasi ekstra kampus HMI Korkom UPI.
4. Mengetahui upaya untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pembentukan *social entrepreneurship* warga negara muda melalui organisasi ekstra kampus HMI Korkom UPI.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil akhir yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni manfaat yang meliputi:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis mengenai nilai-nilai *social entrepreneurship* yang hidup dimasyarakat yang dikaji dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat Memperluas pengetahuan peneliti khususnya, umumnya untuk *civitas akademika* mengenai nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat yang dapat berguna untuk meningkatkan *social entrepreneurship* warga negara muda.
3. Manfaat secara kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta referensi bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung penggalian bakat *social entrepreneurship* bagi warga negara muda.

4. Manfaat secara segi isu/aksi sosial, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi pemerintah secara khusus dan masyarakat secara umum untuk lebih melihat sisi positif serta semua manfaat dari *social entrepreneurship* bagi warga negara muda untuk sebagai solusi Indonesia emas 2045.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Sistematika dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan struktur organisasi skripsi.
2. BAB II Kajian Pustaka, memaparkan mengenai teori atau konsep yang mendukung penelitian ini.
3. BAB III Metode Penelitian, berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian dan beberapa komponen. Komponen yang dimaksud adalah pendekatan penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, proses penelitian tindakan kelas, teknik pengumpulan data, dan analisis data.
4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan gambaran umum, lokasi penelitian, deskripsi dan analisis hasil penelitian.
5. BAB V Kesimpulan dan Saran, menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang didalamnya menjawab dari rumusan masalah. Saran atau rekomendasi ditujukan kepada pembuat kebijakan, pengguna hasil penelitian, dan peneliti berikutnya.